

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hariyadi, Slamet. 2013. *Moral, Hukum dan Keadilan Ditengah Pusaran Korupsi*. Indepth Publishing. Bandar Lampung
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Pelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Makaro, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Muladi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan. Jakarta
- 2002. *Pemberantasan Tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta

Widodo, J.Pajar. 2013. *Menjadi Hakim Progresif*. Indepth Publishing. Bandar Lampung.

Putusan

Mahkamah Agung No. 164 PK/ Pid.Sus/ 2009 tanggal 06 April 2010

Mahkamah Agung No.147 K/ Pid.Sus/ 2009 tanggal 20 Februari 2009

Pengadilan Tinggi Jakarta No.10/ PID/ TPK/ 2008/ PT.DKI tanggal 4 November 2008

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.07/ PID.B/ TPK/ 2008/ PN.JKT.PST tanggal 29 Juli 2008

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 uji materi Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 65/PUU-VIII/2010 uji materi Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Makalah

Sidabukke, Sudiman. 2010. *Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman